

BAB II
SEJARAH ZAMAN
KESHOGUNAN TOKUGAWA DAN RESTORASI MEIJI

Bab ini menjelaskan gambaran saat era keshogunan Tokugawa, seperti kebijakan *sakoku* dan kebijakan larangan penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh pemerintah Edo. Pada bab ini juga menjelaskan tentang runtuhnya keshogunan Tokugawa yang melatarbelakangi terjadinya restorasi Meiji, seperti eksedisi Perry dan perang Boshin yang dilakukan oleh kelompok yang ingin menggulingkan keshogunan Tokugawa. Selanjutnya, penulis juga akan membahas tentang beberapa kebijakan pemerintah Jepang saat restorasi Meiji, seperti pemisahan Buddha dengan Shinto dan pencabutan larangan agama Kristen di Jepang yang menyebabkan kemunduran terhadap agama Buddha.

2.1 Masa Rezim Tokugawa (Edo) dan Runtuhnya Keshogunan Tokugawa yang Melatarbelakangi Terjadinya Restorasi Meiji

Zaman Edo merupakan salah satu periode masa di Jepang yang dipimpin oleh Keshogunan Tokugawa. Kenichi Ohno (2018) dalam buku yang berjudul *The History of Japanese Economic Development* dapat disimpulkan bahwa pada akhir abad ke-12 hingga abad ke-19, Jepang dipimpin oleh kaum samurai. Mulai dari zaman Kamakura (1338–1573), Muromachi (1573–1603), dan yang terakhir adalah Edo (1603–1867) yang dipimpin oleh keluarga Tokugawa.

Zaman Edo merupakan zaman perdamaian Jepang yang sebelumnya Jepang mengalami konflik internal, seperti konflik antar provinsi hingga sesama *daimyo* yang dikutip dari Savanah A. Labbe (2017) dalam jurnal yang berjudul *Religion and State : The Influence of The Tokugawa on Religious Life, Thought, and Institutions* mengatakan bahwa Zaman Edo dimulai dari tahun 1603 hingga 1868 yang merupakan era perdamaian Jepang, dimana di zaman sebelumnya Jepang mengalami peperangan yang berkepanjangan antar provinsi dengan berbagai *daimyo* yang saling memperebutkan kekuasaan satu dengan yang lain dan peperangan tersebut akhirnya berakhir dengan pertempuran Sekigahara pada tahun

1600 dan Tokugawa Ieyasu mengukuhkan kekuasaan atas seluruh negara Jepang yang kemudian diangkat sebagai Shogun. Tokugawa Ieyasu mendirikan pemerintahannya di Edo, yang sekarang Tokyo.

Keshogunan Tokugawa mengambil langkah agar tetap berkuasa dan mengendalikan masyarakat Jepang hampir disetiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk agama. Mereka berusaha untuk mengakhiri perselisihan agama dengan menggunakan agama untuk menegakkan kekuasaannya. Keshogunan Tokugawa tidak ingin adanya lagi peperangan antar agama, karena sebelum era Edo, para sekte agama Buddha menggunakan senjata untuk melawan pemerintah.

Keshogunan Tokugawa juga menghadapi kekacauan yang lain yang sudah ada sejak zaman Muromachi, yaitu penyebaran agama Kristen yang merajalela oleh bangsa Portugis, Dikarenakan perdagangan pasar Jepang belum cukup memadai, sehingga Jepang membuka perdagangannya dengan negara lain, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat Jepang saat itu berpergian ke luar negeri untuk memasarkan produknya.

Terbukanya Jepang dengan negara lain yang menyebabkan agama Kristen masuk ke Jepang oleh bangsa Portugis dan berkembang luas di seluruh Jepang, sehingga keshogunan Tokugawa cemas dan menganggap hal ini akan menyebabkan ancaman politik, mereka menganggap bahwa ajaran Kristen sangat bertentangan dengan sistem yang dianut oleh masyarakat Jepang dan menyebabkan perpecahan antar rakyat dan menyebabkan turunnya kesetiaan terhadap *shogun*, sehingga Tokugawa Ieyasu membuat aturan larangan penyebaran agama Kristen di Jepang, dan aturan *Sakoku* diadakan.

Rezim Tokugawa berlangsung dari tahun 1603 sampai 1868, Jepang menutup diri dari pengaruh dunia luar atau yang dikenal sebagai kebijakan *Sakoku*. Kebijakan *Sakoku* berlangsung, masyarakat Jepang dilarang meninggalkan Jepang, larangan penyebaran agama Kristen, dan orang asing dilarang masuk ke Jepang, terutama dari bangsa Portugis. Namun, Jepang masih memiliki hubungan dengan China, Korea, dan Belanda. Menurut Hiroshi Kano, Yosuke Kawase, dan Ryotaro

Tagaki (2017) dalam jurnal yang berjudul 「鎖国」下の日本の歴史展開：外との交流の中で, mengatakan bahwa kebijakan *Sakoku* merupakan,

「鎖国」とは、江戸時代幕藩体制が固まるにつれて17世紀前半から段階的に取られた対外関係統制策であり、日本人の海外渡航の禁止や在外日本人の帰国の禁止、対外貿易の相手と場所の制限といった内容を含む。

(Hiroshi, et al., 2017)

‘Sakoku’ to wa, Edo jidai bakuhantaisei ga katamaru ni tsurete 17 seiki zenhan kara dankai-teki ni tora reta taigai kankei tōsei-sakudeari, nihonjin no kaigai tokō no kinshi ya zaigai nihonjin no kikoku no kinshi, taigai bōeki no aite to basho no seigen to itta naiyō wo fukumu.

Terjemahan :

Istilah 'pengasingan' mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan hubungan luar negeri secara bertahap sejak paruh pertama abad ke-17, seiring dengan konsolidasi sistem keshogunan dan domain pada zaman Edo. Kebijakan ini mencakup larangan bepergian ke luar negeri, larangan kembalinya orang Jepang ke luar negeri, dan pembatasan mitra dan lokasi perdagangan luar negeri. Kebijakan ini mencakup larangan bepergian ke luar negeri, larangan kembalinya orang Jepang ke luar negeri, dan pembatasan mitra dan lokasi perdagangan luar negeri.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Sakoku* mengacu pada politik isolasi dari dunia luar untuk menegaskan kekuasaan keshogunan Tokugawa yang melibatkan tindakan keras dan membatasi diplomasi antar negara, lalu lintas perdagangan luar negeri, dan larangan berpergian ke luar negeri.

Latar yang membelakangi terjadinya kebijakan *Sakoku* adalah adanya penyebaran agama Kristen oleh bangsa Portugis di zaman Muromachi yang menyebabkan ketundukkan pada *Tenno* semakin menurun, sehingga kebijakan *Sakoku* bertujuan untuk mencegah masuknya Kristen di Jepang dan kuil-kuil Buddha memegang peranan penting pada administrasi negara melalui sistem *danka*. Menurut Kazuto Danno (2015) dalam jurnal yang berjudul 仏教寺院の檀家制度が檀家及び地域社会への貢献において果たすべき役割についての研究：兵庫県篠山市 A 寺檀家調査事例による考察, mengatakan bahwa sistem *danka* merupakan,

檀家制度とは寺院が特定の家の葬祭を永続的に担当して、布施を受ける寺檀関係を基礎とし、宗旨人別帳への記載によって檀家がキリシタンでないことを証明させる制度である。江戸幕府の宗教統制として始まり、戸籍制度の性格を持っていた。

(Kazuto, 2015:42)

Danka seido to wa jiin ga tokutei no ie no sōsai wo eizoku-teki ni tantō shite, fuse wo ukeru tera Dan kankei o kiso to shi, shūshininbetsuchō e no kisai ni yotte danka ga kirishitandenai koto wo shōmei sa seru seidodearu. Edo bakufu no shūkyō tōsei to shite hajimari, koseki seido no seikaku wo motte ita.

Terjemahan :

Sistem danka didasarkan pada hubungan kuil dan di mana kuil secara permanen bertanggung jawab atas layanan pemakaman keluarga tertentu dan menerima persembahan, dan keluarga harus membuktikan bahwa danka tersebut bukan orang Kristen dengan memasukkannya ke dalam daftar pribadi sekte. Sistem ini dimulai sebagai sistem kontrol agama Keshogunan Edo dan memiliki karakter seperti sistem pencatatan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *danka* merupakan sistem afiliasi yang didasari oleh hubungan kuil dan bertanggung jawab atas layanan pemakaman keluarga tertentu dan sistem *danka* juga membuktikan bahwa keluarga tersebut bukan orang Kristen dan sistem ini merupakan sebagai sistem kontrol agama berupa pencatatan keluarga.

Sistem *danka* atau *danka seido* atau yang dikenal sebagai Sistem *Jidan* atau *jidān seido* adalah sistem afiliasi sukarela dalam jangka panjang antara kuil Buddha dan rumah tangga, sehingga rumah tangga mendukung secara finansial dan sebagai gantinya yaitu menyediakan kebutuhan spiritual (Susy, 2017). Walaupun sistem ini sudah ada pada zaman Heian, namun, pada zaman Tokugawa, sistem ini berfungsi untuk menghentikan penyebaran agama Kristen dan dapat mendeteksi *kakure kirishitan* 隠れキリシタン atau orang Kristen yang bersembunyi. Sistem ini secara resmi dihapus selama periode Meiji. (https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kakure-Kirishitan_216628_unkris_p2k-unkris.html)

Sistem *danka* sangat menguntungkan bagi agama Buddha. Kuil – kuil Buddha merasa aman dibawah inkusisi agama, selain itu, sistem *danka* dan para biksu Buddha hanya diperlakukan sebagai biksu resmi kehogunan. Para biksu juga tidak perlu bersusah payah untuk mempromosikan atau menyebar luaskan agama

Buddha di Jepang karena pemerintah Tokugawa saat itu mewajibkan semua masyarakat Jepang beragama Buddha. Karena mendapatkan perlindungan dari pemerintah Tokugawa, para biksu hidup dengan seenaknya dan berfoya – foya dari sumbangan keanggotaan sehingga mendapatkan kebencian atau ketidaksukaan di mata masyarakat. Keuntungan yang didapat agama Buddha selain merasa aman dan adanya sistem *danka*, agama Buddha saat itu diangkat sebagai ‘agama Nasional Jepang’ oleh keshogunan Tokugawa dan agama Buddha dilindungi oleh negara. (Kenji, 2007).

Selain sistem *danka*, keshogunan Tokugawa juga membuat kasta di kalangan masyarakat. Terdapat empat kasta, yaitu *Bushi* (Samurai), *Nomin* (Petani), *Kosakunin* (Pengrajin), *Shonin* (Pedagang). Keempat kasta ini bisa disebut sebagai *Shi-No-Ko-Sho*. Adanya keempat kasta ini, maka seseorang dari suatu kasta tidak dapat masuk ke kasta yang lain, sebagai contoh seorang kasta Pedagang tidak dapat naik ke kasta Pengrajin walaupun orang tersebut memiliki bakat membuat suatu produk. Kasta ini didapat hanya dari keturunannya saja. Keshogunan Tokugawa membuat tingkatan kasta di masyarakat agar dapat mencegah pemberontakan terhadap keshogunan Tokugawa.

Selama periode Tokugawa, keshogunan Tokugawa bersifat diktator dan juga kebijakan *Sakoku* pada awalnya dirancang untuk menjaga tradisi tradisional Jepang dari pengaruh luar, namun kebijakan itu membuat masyarakat Jepang sangat sengsara. Akibat dari kebijakan ini, Jepang sangat tertinggal dengan dunia luar, masyarakat sadar disaat adanya ekspedisi Perry pada tahun 1854.

Selama pada abad ke-19, terjadi banyak peristiwa penting yang menandai berakhirnya rezim Tokugawa, seperti adanya ekspedisi Perry pada tahun 1854 yang menyebabkan politik *Sakoku* berakhir, sehingga Jepang membuka diri dengan dunia luar yang menyebabkan berakhir yang berdampak pada meningkatnya tekanan sosial dan politik dan menimbulkan konflik atau pertempuran besar selama dalam sejarah Jepang, yaitu perang Boshin pada tahun 1868-1869.

2.1.1 Ekspedisi Perry

Setelah adanya revolusi Industri di negeri Barat, bangsa – bangsa Barat berusaha untuk memperluas perdagangan mereka ke wilayah samudera Hindia dan selat Malaka, namun mereka kesulitan dikarenakan Jepang menutup diri dari dunia luar, sehingga bangsa–bangsa Barat saat itu mendesak Jepang untuk membuka negaranya.

Sekitar tahun 1792, Rusia mengirim Adam Laxman ke Jepang untuk hubungan dagang dengan Jepang, namun ditolak oleh Jepang. Rusia tidak menyerah, pada tahun 1807, Rusia mengirimkan kapten Golovin untuk memeriksa Jepang di Kepulauan Kuril atau di Jepang dikenal sebagai Kepulauan Chishima, bagian utara Jepang, namun gagal, sehingga kapten Golovin ditangkap oleh tentara Jepang dan diusir dari Jepang. Rusia yang tidak terima dengan perlakuan Jepang pada akhirnya menyerang Jepang di wilayah utara, sehingga *bakufu* menegatkan pengamanan di wilayah tersebut.

Pada tahun 1808, Inggris mengirimkan sebuah kapal militer ke Jepang untuk membuka negara tersebut, namun ditolak, sehingga pada tahun 1813 hingga 1814, Thomas Stamford Raffles datang ke Jepang dengan 2 kapal militer untuk mendesak Jepang agar membuka negaranya, namun usahanya sia-sia dan Jepang tetap mengusir mereka.

Pada tahun 1844, Raja Belanda yaitu Raja Willem II mengirimkan surat perintah kepada *bakufu* untuk memperingati Jepang bahwa jalur perdagangan dunia sangatlah sibuk dan tidak mungkin Jepang terus–menerus menutup diri dari dunia luar. Dan pada tahun 1848, Perancis mengirimkan kapalnya dan menghasut orang–orang Jepang di pulau Ryukyu untuk berlindung dari orang-orang Inggris.

Berbagai cara bangsa Barat lakukan agar Jepang membuka diri dari dunia luar, namun berakhir sia–sia. Jepang saat itu masih berpegang teguh dengan kebijakan *Sakoku*. Banyak sekali kapal–kapal Barat, termasuk kapal dari Amerika ditembaki oleh Jepang dan awak kapal yang terdampar diperlakukan kurang baik dan disiksa dan dikembalikan ke negara asalnya. Hal ini membuat Amerika mengirimkan Komondor Perry untuk mendesak Jepang agar membuka diri dan

meminta Jepang untuk melindungi awak kapal dari Amerika yang terdampar di perairan Jepang.

Pada tanggal 8 Juli 1853, Komodor Perry tiba di Jepang dan berlayar di teluk Edo, yang sekarang bernama Tokyo. Dibawah komandonya, ia membawa 2 kapal uap dan 2 kapal layar, lalu ia juga mendaratkan skuadron pelaut dan marinir bersenjata lengkap dan memindahkan salah satu kapalnya ke pelabuhan agar masyarakat Jepang ukuran kapal perang tersebut (<https://www.goodnewsfromindonesia.id>).

Kapal yang dipimpin oleh Komodor Perry memiliki persenjataan yang jauh lebih unggul dibandingkan Jepang. Kedatangan Komodor Perry membawa misi, yaitu mengirimkan surat resmi Presiden Amerika Serikat, Millard Fillmore kepada Tokugawa Ieyoshi untuk melakukan hubungan persahabatan antara Amerika – Jepang dan menuntut Jepang untuk menandatangani perjanjian tersebut. Selain itu, Komodor Perry juga memaksa Jepang untuk membuka Pelabuhan Jepang untuk perdagangan dan juga ia mengancam menggunakan kekerasan jika Jepang menolak. Alasannya adalah karena lokasi Jepang yang sangat strategis antara California dan China sehingga dapat menjadikan Jepang sebagai tempat pengisian bahan bakar atau yang dikenal sebagai stasiun batu bara untuk kapal uap dalam perjalanan ke China atau kembali ke California.

Sebelum adanya ekspedisi Perry, Amerika sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan hubungan dengan Jepang agar Jepang membuka pelabuhannya untuk perdagangan Amerika, namun selalu gagal. Ekspedisi ini sudah diajukan oleh David Porter pada tahun 1815, namun ditolak. Lalu pada tahun 1837, saudagar asal Amerika, Charles W. King datang ke Jepang untuk melakukan hubungan perdagangan, namun kapalnya ditembaki oleh Jepang. Pada tahun 1846, pemerintah Amerika melakukan ekspedisi dengan mengirimkan Komodor James Biddle ke teluk Edo untuk melakukan negosiasi namun ditolak Jepang dan mengusirnya. Sehingga saat Amerika melakukan kembali ekspedisi dengan mengirimkan Perry, Komodor Perry memiliki rencana agar Jepang menandatangani perjanjian hubungan diplomatik antara Amerika–Jepang dengan cara menunjukkan kehebatan angkatan laut Amerika. Ekspedisi yang dilakukan oleh Komodor Perry berhasil

meyakinkan para petinggi Jepang saat itu. Dikarenakan Tokugawa Ieyoshi sakit, sehingga ketua konselor senior Jepang, Abe Masahiro dan Komodor Perry adalah orang-orang utama yang bertanggung jawab untuk mengamankan ketentuan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut, Perry menuntut :

1. Jaminan otoritas Jepang melindungi dan membekali atau menyediakan pelaut Amerika yang kapalnya karam di perairan Jepang
2. Mendapatkan izin bagi kapal Amerika untuk memasuki pelabuhan Jepang untuk mendapatkan air, bahan bakar, dan perbekalan lain yang diperlukan
3. Mendapatkan izin bagi kapal dagang Amerika untuk melakukan perdagangan di Pelabuhan Jepang

Sehingga, Abe Masahiro memerintahkan para pejabatnya untuk menerima surat tersebut dan mempertimbangkan kembali, jika ia menerimanya maka memicu kerusuhan sipil, namun jika ditolak maka beresiko perang dengan Amerika. Setelah mempertimbangkannya, Abe menyetujui 2 dari 3 tuntutan, seperti melindungi atau menawarkan bantuan terhadap kapal Amerika jika terjadi karam dan mendapatkan perbekalan seperti bahan bakar, namun hanya di pelabuhan Shimoda dan Hakodate yang jaraknya cukup jauh dari Edo, dan Abe menolak Amerika untuk berdagang di Jepang

Tanggal 31 Maret 1854, keshogunan Tokugawa yang dipimpin oleh anak dari Tokugawa Ieyoshi, Tokugawa Iesada dengan Presiden Amerika saat itu, Franklin Pierce, menandatangani perjanjian damai yang disepakati oleh Perry dan Abe Masahiro, perjanjian damai antara Jepang dan Amerika yang dikenal sebagai konvensi *kanagawa*. (<https://www.kompas.com>).

Setelah menandatangani perjanjian damai, Jepang membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk kepentingan Angkatan laut Amerika. Selanjutnya, Jepang juga menandatangani perjanjian dengan Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Starling pada tanggal 14 Oktober 1854 di Nagasaki dan Rusia yang dipimpin oleh Laksamana Putyatyn pada tanggal 17 Februari 1855 di Shimoda, sehingga pada akhirnya kebijakan *Sakoku* berakhir.

2.1.2 Perebutan Kekuasaan dari *shogun* ke *Kaisar*

Sebelum berakhirnya politik *Sakoku* pada tahun 1854, Jepang hanya berhubungan dengan beberapa negara, seperti Korea di Tsushima, dinasti Qin di kepulauan Ryukyu, dan Belanda di pelabuhan Dejima. Setelah ekspedisi Perry pada tahun 1854, Jepang mulai membuka diri dari dunia luar dan arus perdagangan asing mulai berkembang pesat, selain itu, pengaruh *western* juga berkembang saat itu, sehingga muncul kaum anti-Barat dan membuat slogan yang terkenal, yaitu “*Sonnō jōi*” yang berarti “hormati Kaisar dan usir kaum bar-bar.” slogan ini digunakan untuk menggulingkan keshogunan Tokugawa. (<https://p2k.unibabwi.ac.id>)

Setelah Jepang membuka diri dari dunia luar, Jepang menghadapi berbagai kekacauan di dalam negeri dan perjanjian hubungan perdagangan dan persahabatan yang ditandatangani oleh Jepang, Amerika, Rusia, dan Inggris sangat merugikan masyarakat Jepang dibidang keuangan, dimana perputaran uang emas ke luar Jepang lebih besar daripada di dalam Jepang, karena hal ini pula bangsa Barat mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari Jepang, sehingga perekonomian rakyat kecil semakin sulit.

Selain itu, ada pertentangan antar golongan, yaitu golongan realistik dengan golongan konservatif. Golongan realistik mendukung *bakufu* dalam membuka diri dari dunia luar. Berbanding terbalik dengan golongan konservatif yang menginginkan pengembalian fungsi politik kepada *Tenno* dan menegakan kembali *Tenno* dan kepercayaan Shinto, selain itu mereka menolak adanya hubungan dagang dengan bangsa asing. Sehingga golongan konservatif membuat rencana untuk mengadu kekuatan antara *bakufu* dengan Barat, sehingga mereka melakukan kekerasan terhadap bangsa asing.

Tanggal 24 Juni 1863, beberapa orang dari suku Choshu melakukan penembakan kearah kapal Amerika di selat Shimonoseki, 8 Juli 1863 melakukan penyerangan kepada kapal dari Perancis, dan terakhir ditahun yang sama pada tanggal 11 Juli melakukan penembakan kepada kapal-kapal Belanda. Lalu tentara dari Satsuma melakukan pembunuhan terhadap Richardson yang berkebangsaan Inggris di Namamugi. Akibat dari serangan dari Choshu dan Satsuma, pihak

Amerika, Inggris, dan Perancis melakukan serangan balas dendam, sehingga Amerika dan Perancis menyerang kapal pihak Choshu atas penembakan kapal Amerika dan Perancis, dan Inggris menyerang Satsuma atas meninggalnya Richardson. Dikarenakan persenjataan Choshu dan Satsuma menggunakan persenjataan tradisional, maka mereka kalah terhadap Amerika, Inggris, dan Perancis dan akhirnya mereka mengakui kehebatan dari 3 negara tersebut. Akibat dari kekalahannya terhadap Barat, mereka menerima bangsa Barat datang ke Jepang dan memanfaatkan pengetahuan Barat dalam bidang militer dan pihak Barat akhirnya melatih mereka dengan persenjataan yang lebih modern.

Tanggal 9 November 1867, pihak Satsuma dan Choshu melahirkan perintah rahasia yang mengatasnamakan Kaisar Meiji untuk menggulingkan Tokugawa Yoshinobu, namun Yoshinobu sudah mengundurkan diri terlebih dahulu mengembalikan kekuasaannya ke tangan Kaisar. Walaupun Yoshinobu mengundurkan diri dari kekuasaannya, namun anak buahnya masih melakukan tugasnya seperti biasanya dan keshogunan Tokugawa tetap menjadi dominan dalam politik, sehingga kejadian ini tidak diterima oleh pihak Satsuma dan Choshu. Pada tanggal 24 Januari 1868, Tokugawa Yoshinobu melakukan serangan terbuka atas Kyoto yang telah diduduki oleh Satsuma dan Choshu dan hal ini pula menyebabkan perang Boshin terjadi. Menurut Katsu Sasaki (2000) dalam jurnal yang berjudul 戊辰戦争への道: 幕末の国家的 課題をめぐって, perang boshin merupakan,

戊辰戦争は国内統一戦争であり、この戦争に勝利した維新政府・明治政府の政治指導によって、日本の近代化の道が切り拓かれていった、というようなことになるだろう。すなわち戊辰戦争を、日本の近代の出発点に位置付けるという見解である。

(Katsu, 2000:1)

Boshinsensō wa kokunai tōitsu sensōdeari, kono sensō ni shōri shita ishin seifu Meiji seifu no seiji shidō ni yotte, Nihon no kindai-ka no michi ga kiri hiraka rete itta, to iu yōna koto ni narudarou. Sunawachi boshinsensō wo, Nihon no kindai no shuppatsu-ten ni ichidzokeru to iu kenkaidearu.

Terjemahan :

Perang Boshin adalah perang penyatuan nasional, dan kepemimpinan politik pemerintahan Meiji dan Restorasi yang memenangkan perang

membuka jalan bagi modernisasi Jepang. Dengan kata lain, pandangan ini menempatkan Perang Boshin sebagai titik awal modernisasi Jepang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perang boshin merupakan perang penyatuan Jepang antara pasukan kekaisaran lama dan pasukan pemerintah baru yang terjadi pada tahun 1868 hingga 1869 yang melibatkan keshogunan Tokugawa dengan pihak yang ingin mengembalikan kekuasaan ketangan Kaisar, dikarenakan ketidakpuasan para bangsawan dan samurai dengan rezim Tokugawa dalam menangani bangsa asing setelah politik *Sakoku* berakhir. Masuknya bangsa asing ke Jepang menyebabkan munculnya kelompok anti shogun, seperti Satsuma dan Choshu, dikarenakan banyak masyarakat Jepang saat itu sudah jenuh dengan keshogunan Tokugawa yang semena-mena dan otoriter. Mereka juga menuntut agar kekuasaan Jepang Kembali ke tangan Kaisar. Perang ini terjadi pada masa kekuasaan Tokugawa Yoshinobu.

Perang Boshin melibatkan beberapa negara, seperti Amerika, Inggris dan Perancis. Pada tanggal 27 Januari 1868, terjadi bentrok antara pasukan keshogunan dan pasukan Choshu dan Satsuma di Toba dan Fushimi. Sekitar 15.000 orang pasukan keshogun yang dilatih oleh kelompok militer Prancis melawan sekitar 5.000 orang pasukan dari pihak Choshu dan Satsuma yang dilatih oleh kelompok militer Inggris dan Amerika Serikat. Walaupun jumlah pasukan Choshu lebih sedikit dari pasukan keshogunan, namun mereka membawa perlengkapan senjata yang modern, seperti senapan Gatling, Howitzer, dan senapan Minie berbanding terbalik dengan pasukan keshogunan, dimana beberapa diantara mereka masih menggunakan samurai tradisional. Pada saat itu juga beberapa *daimyo* lokal yang awalnya setia pada shogun dan pada akhirnya membelot, seperti Domain Yodo dan Tsu. Pada perang tersebut, pasukan keshogunan kalah telak dari pasukan Choshu dan Satsuma.

Tanggal 28 Januari 1868 terjadi *Awa Oki Kaisen* atau yang dikenal sebagai Pertempuran Awa di lepas pantai Provinsi Awa yang berada dekat dengan Osaka. Perang ini melibatkan Satsuma yang dipimpin oleh Akatsuka Genraku dengan pasukan keshogunan yang dipimpin oleh Enomoto Takeaki. (http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Awa_186672_p2kp-stiki.html)

Pada tanggal 7 Februari 1868, Tokugawa Yoshinobu melarikan diri dari Osaka ke Edo, yang sekarang bernama Tokyo. Akibat Yoshinobu melarikan diri ke Edo dan Domain Yodo dan Tsu membelot, pasukan keshogunan mundur, sehingga istana Osaka diduduki oleh pasukan Choshu dan Satsuma dan pertempuran Toba dan Fushimi berakhir.

2.2 Pengertian Restorasi Meiji

Meiji Ishin atau yang dikenal sebagai restorasi Meiji atau revolusi Meiji adalah sebuah rangkaian peristiwa Jepang yang terjadi pada tahun 1866 hingga 1869 dan puncaknya terjadi pada tahun 1868 dan berdasarkan Marius B. Jansen (1989) dalam buku yang berjudul “*The Cambridge History Of Japan vol. 5 The Nineteenth Century*”, mengatakan bahwa :

“Although the actual events of 1868 constituted little more than a shift of power within the old ruling class, the larger process referred to as the Meiji Restoration brought an end to the ascendancy of the warrior class and replaced the decentralized structure of early modern feudalism with a central state under the aegis of the traditional sovereign, now transformed into a modern monarch. The Restoration leaders undertook a series of vigorous steps to build national strength under capitalist institutions and rapidly propelled their country on the road to regional and world power. Thus the Restoration constituted a major event for Japanese, East Asian, and world history”

(Marius, 1989:308)

Terjemahan :

“Meskipun peristiwa aktual tahun 1868 yang menyebabkan lebih banyak pergeseran kekuasaan di dalam kelas penguasa lama, proses yang lebih luas yang dikenal sebagai Restorasi Meiji berakhir dan menggantikan kekuatan kelas militer. struktur desentralisasi feodalisme modern awal dengan struktur negara sentral di bawah naungan penguasa tradisional, yang kini berubah menjadi monarki modern. Para pemimpin Restorasi melakukan serangkaian langkah-langkah kuat untuk membangun kekuatan nasional di bawah institusi kapitalis dan dengan cepat mendorong negara mereka menuju kekuatan regional dan dunia. Dengan demikian Restorasi merupakan peristiwa besar bagi Jepang, Asia Timur, dan sejarah dunia.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa restorasi Meiji terjadi pada tahun 1868 merupakan sebuah peristiwa besar yang terjadi di Jepang yang menyebabkan sedikit pergeseran kekuasaan dalam kelas penguasa lama dalam proses yang lebih besar yang mengakhiri kekuasaan kelas militer dan menggantikan

struktur desentralisasi feodalisme modern awal dengan struktur negara sentral dibawah kepemimpinan monarki modern. Para pemimpin mengambil berbagai langkah untuk membangun kekuatan nasional di bawah institusi kapitalis dan dengan cepat membawa Jepang ke kekuatan regional dan dunia. Restorasi Meiji terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Tokugawa dan banyak pihak yang menginginkan kekuasaan Jepang kembali ditangan Kaisar, sehingga mereka ingin menggulingkan *Bakufu* dan didukung oleh beberapa kaum bangsawan dan samurai, sehingga pada tanggal 3 Januari 1868, beberapa samurai dari Han melakukan kudeta dengan merebut istana kekaisaran Kyoto.

Banyak ahli sejarah membandingkan restorasi Meiji terhadap revolusi Perancis pada tahun 1789–1799 yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte dan revolusi *Bolshevik* atau yang sering dikenal sebagai revolusi Oktober yang terjadi pada 25 Oktober 1917 di Uni Soviet yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Persamaan antara Restorasi Meiji dengan revolusi Perancis dan revolusi Oktober adalah ketidakpuasan sehingga terjadinya pengambilan kekuasaan. Restorasi Meiji juga menjadi salah satu peristiwa penting yang menandakan awal mula modernisasi Jepang

2.3 Dampak Restorasi Meiji

Setelah terjadinya berbagai peristiwa berdarah, seperti perang Boshin, maka Tokugawa Yoshinobu mengembalikan kekuasaan Jepang sepenuhnya ketangan Kaisar, Kaisar yang menjabat saat itu adalah Kaisar Meiji yang bernama Mutsuhito, yaitu Kaisar Jepang ke-122 yang berkuasa pada tahun 1867–1912.

Pada masa kepemimpinannya, ia memindahkan ibukota kekaisaran Kyoto ke Edo dan berubah menjadi Tokyo dan daerah feodal resmi dihapus, diganti menjadi sistem daerah admistrasi atau yang dikenal sebagai prefektur dan sistem kelas terhadap masyarakat dihapus, sehingga hak-hak istimewa *daimyo* dan kaum samurai hilang.

Perubahan sistem dari *shogun* ke Kaisar yang menyebabkan terjadinya peperangan, seperti perang Boshin. Berbagai golongan konservatif, seperti Choshu dan Satsuma akhirnya menerima perubahan kearah lebih modern dan menjadikan

mereka sebagai tokoh modernisme, hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya Angkatan laut dan Angkatan darat yang mencontoh dari Barat.

Jepang mulai melakukan modernisasi, sehingga pemerintah Jepang mulai melakukan perubahan secara besar-besaran dari segi ekonomi, pendidikan, dan teknologi sehingga Jepang bisa setara dengan bangsa Barat. Agar perubahan ini berhasil dan Jepang dapat memajukan negaranya, Jepang belajar dari Barat dan mengajarkannya kembali ke masyarakat Jepang. Selain itu, tokoh samurai muda sangat berjasa dan mempunyai peranan penting pada masa kekaisaran Meiji, mereka mendorong pemerintah Meiji melakukan hubungan intensif dengan Barat, sehingga pada tanggal 7 April 1868, pemerintah Jepang membuat “Piagam Sumpah” atau “Sumpah dalam Lima Pasal” dalam Bahasa Jepang yaitu *Gokajō no Goseimon*.

Sumpah lima pasal mencakup lima poin “semua politik harus diputuskan melalui diskusi rakyat” dan “carilah pengetahuan dari dunia dan saringlah dasar – dasar pemerintahan Kaisar yang dikeluarkan oleh Kaisar Meiji sebagai sumpah kepada Dewa. Pada saat *Gokajō no Goseimon*, perang Boshin masih berlangsung. Adanya sumpah dalam 5 pasal ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan bagi pemerintahan baru dengan menghadirkan kebijakan politik baru. Sumpah dalam Lima Pasal berisi :

1. Mengatur pendapat dalam melakukan politik, mendiskusikan dan memutuskan segala sesuatu dalam hal politik dalam rapat
2. Menetapkan bahwa bangsa harus diperintahkan dengan satu pemikiran tanpa memandang kelas sosial
3. Menetapkan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang mana setiap orang, baik pejabat pemerintahan, samurai, dan orang biasa dapat mencapai aspirasinya terlepas dari statusnya
4. Menetapkan bahwa kebiasaan lama yang buruk harus dihapuskan dan prinsip-prinsip umum (hukum internasional) harus diikuti
5. Mengatur pembangunan bangsa-bangsa dalam mengejar peradaban (pengetahuan) Barat yang maju

“Sumpah dalam Lima Pasal” tersebut, Kaisar bersumpah pada Dewa dan Kaisar akan bertanggungjawab terhadap pemerintah, sehingga pemerintah baru dinilai dapat dipulihkan.

Jepang sangat sadar atas ketertinggalannya dengan negara lain, seperti negara Barat, sehingga Jepang melakukan kunjungan ke negara-negara Barat yang dipimpin oleh Iwakura Tomomi pada Desember 1871–September 1873, perjalanan ini dikenal sebagai misi Iwakura. Dalam perjalanannya, Iwakura mengunjungi Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Italia, Swiss, Denmark, Swedia, Belanda, Belgia, Austria, dan Italia dan juga mengunjungi pabrik, sekolah, pelabuhan, dan kantor pemerintahan, serta bertemu dengan para pemimpin negara saat itu (Susy, 2017).

Misi Iwakura menyimpulkan bahwa Jepang masih sangat jauh tertinggal dengan negara Barat seperti dalam hal kualitas sumber daya manusia dan industri, sehingga Jepang mencontoh negara Barat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti menerapkan sistem wajib belajar, sehingga kemajuan industri dan pembangunan militer akan berhasil. Selanjutnya, pemerintah Jepang juga bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk melakukan kampanye untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mengatasi kebiasaan masyarakat Jepang saat itu, seperti malas, tidak hemat, tidak disiplin, tidak tepat waktu, dan jorok.

Berbagai cara pemerintah Jepang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti mendirikan pendidikan luar sekolah dan perpustakaan yang bertujuan untuk menyamakan kedudukan Jepang setara dengan negara Barat. Selanjutnya, pemerintah Jepang juga memebentuk *bunmei kaika* yang berarti “membangun masyarakat lebih beradab.” *Bunmei Kaika* mengacu pada fenomena modernisasi melalui masuknya peradaban Barat pada awal periode Meiji. Dikarenakan masyarakat Jepang saat itu sangat tidak beradab, membawa tong yang berisi kotoran, telanjang di jalan, membuang kotoran disembarang tempat, dan lain sebagainya sehingga orang Barat yang datang ke Jepang saat itu mengeluh atas apa yang mereka lihat, sehingga pemerintah membuat UU larangan telanjang di tempat umum pada tahun 1871 dan setahun kemudian, pada tahun 1872, pemerintah Jepang

memberlakukan sanksi bagi pelanggarnya. Namun, banyak sekali masyarakat yang melanggarnya sehingga penjara Jepang saat itu penuh, sengketa banyak terjadi saat itu, tempat hiburan sangat ramai, namun acara keagamaan sepi pengunjung, majalah porno sangat laku dipasaran, namun majalah ilmiah tidak laku.

2.4 Kebijakan pemerintah Meiji yang berdampak pada agama Buddha

Selain reformasi adat, pemerintah Jepang saat itu membuat berbagai kebijakan agar Jepang menjadi negara modern dan juga mendapatkan desakan dari Barat untuk membebaskan masyarakat Jepang untuk memilih agama yang mereka inginkan dan hal ini menjadi malapetaka bagi penganut Buddha. Kebijakan Jepang saat itu adalah pemisahan agama Buddha–Shinto dan mencabut larangan agama Kristen di Jepang.

2.4.1 Kepercayaan Shinto menjadi ‘agama asli’ dan agama nasional Jepang

Shinto adalah sebuah kepercayaan lokal masyarakat Jepang yang sudah ada sebelum Buddha masuk ke Jepang. Dilansir dari www.shinto.org (2023), pengertian Shinto dalam Bahasa Jepang

日本の古代から現代に続く民族宗教であり、日本人の生活文化の全般に浸透し、しかも外来文化を受け入れて、日本的に変容させるというエネルギーをもっています。

(www.shinto.org)

Nihon no kodai kara gendai ni tsudzuku minzoku shūkyōdeari, nihonjin no seikatsu bunka no zenpan ni shintō shi, shikamo gairai bunka o ukeirete, nipponteki ni henyō sa seru to iu enerugī o motte imasu.

Terjemahan :

Shinto adalah kepercayaan rakyat Jepang kuno dan modern yang masih ada hingga saat ini yang menyerap semua aspek kehidupan dan budaya Jepang dan lebih dari itu, Shinto memiliki energi untuk menerima budaya asing dan mentransformasikannya dengan cara Jepang.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Shinto merupakan kepercayaan rakyat Jepang kuno yang masih ada hingga sekarang dan menyerap semua aspek kehidupan dan budaya masyarakat Jepang. Menurut Sri Dewi Adriani (2007) dalam jurnal yang berjudul *Eksistensi Agama Shinto Dalam Pelaksanaan Matsuri di*

Jepang mengatakan bahwa Shinto berasal dari kata *shin* yang berarti Dewa dan *to* yang berarti jalan, jadi Shinto memiliki arti yaitu “jalan Dewa.” Sebelum Buddha masuk ke Jepang, kepercayaan Shinto hanya dilakukan klan atau keluarga yang berkuasa (Sri, 2007). Dalam kepercayaan Shinto, pendiri bangsa Jepang pada awalnya berasal dari surga yang turun ke bumi dan menjelma sebagai Kaisar atau yang disebut sebagai *Tenno* (Sri, 2007). Selain itu, mereka juga mempercayai bahwa *Tenno* memiliki garis keturunan Dewa Amaterasu atau yang dikenal sebagai *Amaterasu-ōmikami*. *Amaterasu* adalah Dewa matahari. kepercayaan Shinto Setelah Buddha dan Kongfucu masuk ke Jepang, nama Shinto baru digunakan.

Sebelum adanya restorasi Meiji, dewa-dewi dari kepercayaan Shinto dengan agama Buddha menjadi satu kesatuan dan juga adanya penggabungan antara kuil Buddha dengan Shinto dan juga kepercayaan Shinto tidak memiliki kitab suci, berbeda dengan agama Buddha yang memiliki kitab suci, kitab Tripitaka dan juga saat itu agama Buddha merupakan agama nasional Jepang saat zaman Edo. Menurut Marra Claudia (2014) dalam jurnal yang berjudul *Haibutsu Kishaku*, mengatakan bahwa :

“In syncretistic interpretation, Shintō deities, (神, *kami*) were either perceived as lost beings in need of liberation through the power of Buddha, singled out as protectors of the Dharma, or even seen as emanations of the Buddha with the task to guiding humans on their path to salvation.”

(Marra, 2014:177)

Terjemahan :

“Dalam penafsiran sinkretis, dewa-dewa Shinto, (神, *kami*) dianggap sebagai makhluk yang tersesat yang membutuhkan pembebasan melalui kekuatan Buddha, dipilih sebagai pelindung Dharma, atau bahkan dipandang sebagai emanasi Buddha dengan tugas untuk membimbing manusia di jalan menuju keselamatan.”

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman sinkretisme antara Buddha dan Shinto dikatakan bahwa Dewa- Dewi Shinto dianggap sebagai makhluk yang tersesat, sehingga mereka memilih Buddha sebagai pelindung Dharma atau dipandang sebagai emanasi Buddha yang bertugas untuk membimbing manusia menuju keselamatan.

Sebelum terjadinya restorasi Meiji, para penganut kepercayaan Shinto mendirikan sekte yang bertujuan untuk melestarikan tradisi Shinto menjadi sebuah agama yang terorganisir. Dalam perkembangannya, ada 2 elemen perkembangan kepercayaan Shinto selama restorasi Meiji, yaitu :

1. Kebijakan keagamaan pada masa Meiji memainkan peran dalam pembentukannya
2. Keinginan para pemimpin Shinto untuk melakukan modernisasi yang memiliki peran dalam membentuk sekte

Yijiang Zhong (2016) dalam buku yang berjudul *The Origin of Modern Shinto in Japan* menyimpulkan pada tahun 1867, pemerintah Meiji memberikan serangkaian pengumuman yang dimulai dari “Komando besar restorasi Kaisar” atau yang disebut sebagai *Oosei Fukko no Daigourei* dan mengumumkan “pembaruan kuno yang ditetapkan oleh Kaisar Jimmu” (Yijiang, 2016). Slogan *Oosei Fukko no Daigourei* berfungsi sebagai alat ideologis yang dirancang untuk “menciptakan, mengartikulasi, dan mewujudkan persekutuan yang terbentang dari berbagai *Jingi* melalui sosok Kaisar, sehingga pemerintah Meiji menggunakan slogan itu untuk mengklaim pembangunan persatuan rakyat dan bangsa berdasarkan pembentukan yang disebut sebagai “totalitas ontologis universal” yaitu sebuah ideologi yang mencakup negara dan masyarakat yang mana kehidupan kini dan kehidupan setelahnya, dan dunia manusia dan *Kami* (Yijiang, 2016).

Tahun 1868, kesatuan ritual dan aturan atau yang disebut *saisei itchi* dinyatakan sebagai dasar dari pemulihan pemerintah. Lalu, pemerintah juga mengumumkan pembentukan kembali mendirikan Departemen Ketuhanan atau yang disebut sebagai *Jingikan*. Departemen ini bertugas untuk mengayomi kepercayaan Shinto di seluruh penjuru Jepang. Walaupun Departemen ini sudah ada sejak zaman Heian, namun dalam pelaksanaan berbeda. Departemen Ketuhanan menyediakan bentuk kelembagaan dimana *Kami* dan manusia dapat digabungkan dengan ritual dengan membentuk suatu kesatuan ontologis, negara Shinto. Pembangunan negara Shinto dimulai dari mengambil alih Kuil dari Buddha, pemimpin agama, dan *Kami*. Kuil Shinto menyediakan saluran institusional untuk menghasilkan kesatuan ontologis melalui ritual keagamaan yang memungkinkan

kuil Shinto berfungsi sebagai penghubung *Kami* dengan manusia dan kuil di seluruh Jepang yang berpusat di Tokyo.

Kepercayaan Shinto juga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan kepercayaan Shinto sebagai kepercayaan nasional Jepang. Shinto dijadikan sebagai kepercayaan nasional memiliki beberapa alasan, namun alasan yang kuat adalah untuk mengantisipasi masuknya agama Kristen di Jepang.

Kristenisasi dianggap sebagai ancaman bagi bangsa oleh pemerintah dan kelompok agama lainnya, sehingga Shinto menjadi sebuah agama yang mencerminkan kesetiiaannya kepada Jepang. Selain itu, pemerintah Jepang juga mencoba untuk memisahkan kepercayaan Shinto dengan agama Buddha dan disisi lain, pemerintah Meiji saat itu sangat mengandalkan Shinto untuk asas politik religius yang dikarenakan dalam ajaran Shinto sangat mempercayai adanya *Kami* atau Dewa, ada anggapan yang mengatakan bahwa “taat dengan *Kami* berarti taat kepada Kaisar.” Pemisahan agama Buddha dengan kepercayaan Shinto disebut sebagai *Shinbutsu Bunri*. *Shinbutsu Bunri* terjadi karena ada gerakan permunian kepercayaan Shinto dan memisahkan kepercayaan Shinto dengan agama Buddha.

Pemisahan antara agama Buddha dan Shinto diumumkan oleh Dewan Negara atau yang disebut sebagai *Daijō-kan* pada tanggal 14 Mei 1871, Kuil tersebut akhirnya digunakan sebagai fasilitas ritual negara. Lalu, Departemen Ketuhanan juga mengumumkan bahwa semua Kuil Shinto di seluruh Jepang berada dibawah kendali Departemen Ketuhanan dan diorganisir ke dalam sistem ritual nasional dengan Kuil Ise berada di atas, lalu diikuti oleh 97 kuil Prefektur dan berbagai kuil yang lain dengan tingkat paling rendah (Yijiang, 2016). Dengan adanya pemisahan Kuil Shinto dengan Buddha diharapkan dapat memikul tugas – tugas rumah tangga yang sebelumnya dilakukan umat Buddha dan ritual pemakaman. Lalu, sistem registrasi nasional rumah tangga, seperti pendaftaran kelahiran, pindah tempat tinggal, dan kematian yang pada awalnya berpusat di Kuil Buddha menjadi di Kuil Shinto.

Pertengahan tahun 1869, pemerintah Meiji mewajibkan semua pemuka agama (pendeta atau biksu) Shinto untuk menjalankan pemakaman dengan ritual

kepercayaan Shinto, sehingga dapat mengantarkan jiwa–jiwa yang pergi ke *Kami* dan meninggalkan pemakaman dengan ritual agama Buddha. Ritual pemakaman dengan ritual kepercayaan Shinto dimaksud untuk mempersiapkan pemindahan upacara pemakaman dari agama Buddha ke kepercayaan Shinto. Jabatan biksu yang sebelumnya turun menurun dihapuskan. Sebagai gantinya pejabat biksu akan diangkat dan digaji oleh pemerintah.

Sekitar tahun 1882, pemerintah Meiji melalui kementerian dalam negeri mendirikan 2 sekolah Shinto untuk orang–orang yang ingin menjadi pemuka kepercayaan Shinto dan mendirikan jinja di seluruh Jepang dan membentuk asosiasi pemuka kepercayaan Shinto sebagai perantara antara kemendagri dengan para pemuka kepercayaan Shinto dan hal ini dimanfaatkan pemuka kepercayaan Kristen untuk meminta subsidi ke pemerintah.

2.4.2 Pencabutan larangan Kristen

Saat rezim Tokugawa berlangsung, agama Kristen dilarang masuk ke Jepang dan pemerintah Jepang juga mencatat melalui sistem *danka* agar mereka mengetahui siapa saja umat Kristen bersembunyi. Keshogunan Tokugawa memberlakukan hal tersebut karena Kristen dianggap sebagai ancaman terhadap budaya dan stabilitas politik, sehingga mereka membuat kebijakan *Sakoku*.

Akibat dari adanya larangan penyebaran agama Kristen di Jepang, misionaris asing akhirnya diusir paksa dari Jepang, jika mereka menolak, maka keshogunan Tokugawa tidak segan akan menangkap mereka dan membunuhnya. Hampir sama dengan para misionaris, masyarakat Jepang yang memeluk agama Kristen saat itu akan disiksa dengan cara digantung secara terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah serta di bawahnya terdapat kubangan kotoran, dimasukan kedalam air yang mendidih, dan dihukum mati jika mereka menolak menginjak lempengan tembaga bergambar Yesus atau Maria yang kadang–kadang dipasang di papan kayu, pemaksaan ini disebut *fumie*. *Fumie* dilakukan untuk mengetahui apakah orang tersebut beragama Kristen atau bukan dan juga untuk mematahkan keimanan mereka. Praktik *fumie* dilakukan untuk setiap orang yang tinggal di Nagasaki. Peraturan *fumie* banyak mendapatkan pertentangan di kalangan masyarakat,

sehingga terjadinya pemberontakan untuk menentang larangan masyarakat Jepang pergi ke luar negeri dan larangan penyebaran buku-buku Kristen. Pemberontakan ini terjadi di Shimbara, Kyushu, sehingga pemberontakan ini bernama *Shimbara no Ran* yang terjadi pada tahun 1637 -1638.

Gambar 1 Fumie



(Sumber : www.ucatholic.com)

Gambar di atas merupakan *Fumie* yaitu lempengan tembaga yang berbentuk Yesus dan Bunda Maria. Pemerintah Jepang pada saat itu memerintah kepada rakyatnya agar menginjak lempengan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui apakah orang tersebut beragama Kristen atau bukan.

Gambar 2 Penyiksaan Secara Digantung



(Sumber : www.bbc.com)

Gambar di atas merupakan penyiksaan pemerintah Jepang pada saat itu kepada penganut agama Kristen. Mereka yang menolak menginjak *fumie* disiksa

dengan cara digantung terbalik dan di bawah terdapat kubangan kotoran atau dimasukan ke dalam air yang mendidih.

Akibat dari pemberontakan tersebut, keshogunan Tokugawa memperketat aturan, orang Jepang tidak diperbolehkan ke luar negeri dan orang Jepang yang di luar negeri tidak diperbolehkan kembali ke Jepang, orang asing juga tidak diperbolehkan ke Jepang. Lalu, perdagangan dengan China dan Belanda diperketat, untuk mencegah masuknya buku–buku Kristen.

Setelah kebijakan *Sakoku* berakhir dan rezim Tokugawa usai, pada tahun 1873 pemerintahan Meiji mencabut larangan agama Kristen secara permanen, dikarenakan dalam piagam sumpah dalam lima pasal pada pasal ke-5 yang berinti pada Jepang akan mencari pengetahuan dunia, karena Kristen dianggap sebagai penyebaran pengetahuan Barat ke Jepang. Dan karena pencabutan larangan agama Kristen, masyarakat Jepang bebas memeluk keyakinan yang mereka yakini tanpa adanya paksaan dari siapapun. Hal ini menyebabkan penyebaran agama Kristen sangat pesat. Banyak misionaris yang berasal dari Amerika dan Eropa datang ke Jepang untuk menyebarkan agama Kristen, mereka juga mendirikan sekolah – sekolah keagamaan. Motivasi orang Barat mendirikan sekolah di Jepang karena dapat mendidik dan menyebarkan agama Kristen di Jepang sehingga banyak orang Jepang yang pindah agama ke Kristen.

Irwin Scheiner (1970) dalam buku yang berjudul *Christian Converts and Social Protests in Meiji Japan* dapat disimpulkan bahwa Gereja juga berkembang semakin pesat di seluruh negeri Jepang. Bahkan salah satu kota terbesar di Jepang, Kyoto, toko–toko buku dengan suka rela menyediakan Alkitab dan buku–buku berbau Kristen dalam tulisan Jepang maupun Inggris (Irwin, 1970:100). Lalu, orang–orang yang datang ke Gereja lebih banyak dari anggota Gereja, dikarenakan banyak masyarakat Jepang yang bukan beragama Kristen menghadiri kebaktian dan tertarik dengan ceramah yang diselenggarakan oleh agama Kristen. Keanggotaan Gereja terhitung dari tahun 1883–1885 mengalami kenaikan yang sangat tajam, yaitu 120%. Pada tahun 1879, sudah ada 44 Gereja dengan jemaat yang mencapai 1617 orang, pada tahun 1885, terdapat 1100 jemaat dengan 168 Gereja yang

tersebar, dan pada tahun 1889, 300 Gereja tersebar dan sekitar 34000 orang berpindah agama ke Kristen (Irwin, 1970).

Pada tahun 1880an, agama Kristen sangat berpengaruh di Jepang, sehingga beberapa pejabat meminta pemerintah Jepang agar agama Kristen menjadi agama nasional Jepang. Tanggapan agama lain memainkan peran dalam kemajuan Jepang, agama-agama lain berusaha meredam tentang pesatnya perkembangan agama Kristen di Jepang dan mereka menganggap sebagai otoritas asing, sehingga pemimpin pemuka agama Jepang, seperti Buddha, Shinto, dan Konghucu membuat sebuah Gerakan, yaitu Gerakan anti Kristen. Mereka bergabung menjadi satu kesatuan untuk meremehkan Kekristenan.

Rebecca Velker (2013) dalam thesis yang berjudul *A Thread In Japan's History : The Historical Journey Of Japanese Christianity to the Brink of Modern Japan* dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1893, seorang pendeta Jepang yang bernama Tamura Naoomi merilis sebuah buku dalam Bahasa Inggris yang berjudul *The Japanese Bride*. Buku ini ditujukan untuk pembaca Amerika dan praktik – praktik dalam keluarga Jepang secara terperinci dan menjadi perdebatan sengit di Jepang. Buku ini menentang klaim bahwa Jepang menjadi negara kekaisaran yang modern dan beradab dan dianggap sebagai karya anti nasionalisme. Tamura Naoomi percaya bahwasannya Kristen dapat membantu mereformasikan praktik – praktik keluarga di Jepang dan memposisikan perempuan di dalam rumah (Rebecca, 2013). Orang Jepang menganggap orang Jepang yang beragama Kristen merupakan orang asing dalam ideologi mereka dan orang Kristen di Jepang dipandang rendah oleh orang-orang Jepang yang bukan beragama Kristen. Konflik yang dihadapi oleh orang Kristen di Jepang dalam mendamaikan dan pengabdianya dalam iman Kristen dan juga kesetiaan mereka kepada Jepang semakin jelas melalui perdebatan dalam buku tersebut.

Tahun 1874, para misionaris yang berasal dari Amerika memberikan pendidikan modern dengan mendirikan sekolah dan universitas di Jepang untuk kegiatan penyebaran agama Kristen di Jepang. orang – orang yang lulus dari sekolah tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga mendapatkan rasa syukur dan pada akhirnya masuk Kristen. Pendidikan ini

ditunjukkan untuk anak-anak mantan kaum samurai yang menginginkan tetap menjadi penguasa Jepang di masa modern yang dapat dicapai dengan pendidikan modern yang belajar dari Barat.

Umat Kristen di Jepang dengan Amerika juga melakukan kampanye anti alkohol, prostitusi, dan poligami dengan membuat dan menyebar pamflet tentang bahaya alkohol bagi kesehatan dan pamflet tentang menolong para gadis muda yang dijual oleh orangtuanya ke tempat 'pelacuran'. Karena adanya usaha tokoh-tokoh Kristen di Jepang dalam membujuk pemerintah Meiji, sehingga pemerintah Meiji membuat UU Hukum Perdata dan memasukan larangan poligami dalam pasal 732 di tahun 1898.

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah Jepang dikuasai oleh shogun Tokugawa yang terjadi pada tahun 1603–1868, keshogunan Tokugawa membuat sebuah kebijakan, yaitu kebijakan *Sakoku* dimana Jepang menutup diri dari dunia luar, sehingga orang asing tidak bisa masuk ke Jepang dan orang Jepang yang di luar negeri pada akhirnya tidak dapat masuk ke Jepang. Kebijakan ini dibuat agar dapat menekan penyebaran agama Kristen di Jepang dan mencegah masuknya agama Kristen di Jepang. Tokugawa beranggapan bahwa dengan maraknya penyebaran agama Kristen di Jepang, maka kepercayaan terhadap *Tenno* menurun, hal ini terjadi di zaman Muromachi. Pada zaman ini Buddha memegang peran penting dalam administrasi negara, sehingga mereka membuat sistem *danka*. Sistem *danka* merupakan sistem afiliasi sukarela dalam jangka Panjang antara kuil Buddha dengan rumah tangga masyarakat Jepang, sehingga rumah tangga mendukung secara finansial dan sebagai gantinya yaitu kuil Buddha menggantinya dengan menyediakan kebutuhan spiritual. Sistem *danka* juga bertujuan agar dapat mengetahui orang-orang Kristen yang bersembunyi, disebut sebagai *Kakure Kirishitan*.

Akibat dari kebijakan *Sakoku*, bangsa-bangsa Barat merasa kesulitan, dikarenakan mereka ingin memperluas perdagangan ke wilayah samudera Hindia dan selat Malaka, namun terhalang dengan Jepang yang menutup diri dari dunia luar, sehingga bangsa Barat mendesak Jepang untuk membuka negara mereka. Berbagai cara mereka lakukan namun selalu gagal, sehingga Amerika mengirimkan

Komondor Perry agar mendesak Jepang membuka diri dan mengancam jika Jepang menolak, perjalanan Komondor Perry dikenal sebagai Ekspedisi Perry. Adanya desakan dari Amerika membuat Jepang semakin terdesak, sehingga pada tanggal 31 Maret 1854, Jepang menandatangani surat perjanjian damai dengan Amerika, yang disebut konvensi *kanagawa*, setelah menandatangani perjanjian ini maka Jepang membuka diri dengan dunia luar.

Setelah membuka diri dengan dunia luar, Jepang menghadapi berbagai kekacauan di dalam negeri, peperangan tidak dapat dihindarkan, maka pada tahun 1868 terjadilah perang Boshin yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Tokugawa dikarenakan masyarakat Jepang tidak puas terhadap rezim Tokugawa dan menginginkan kekuasaan Jepang kembali ke tangan Kaisar, rangkaian kejadian tersebut disebut juga restorasi Meiji. Setelah keshogunan Tokugawa berhasil digulingkan, maka rezim Tokugawa resmi berakhir dan pemerintahan Meiji lahir.

Dampak dari adanya restorasi Meiji sangat dirasakan oleh masyarakat Jepang, mereka merasa bahwa Jepang sangat tertinggal dengan negara Barat, sehingga pemerintah Meiji megutus Iwakura Tomomi untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa dan Amerika, perjalanan ini disebut misi Iwakura. Selain itu, pemerintah Meiji juga mendirikan pendidikan luar sekolah dan perpustakaan agar dapat menyamakan kedudukan Jepang dimata Barat, selain itu, pemerintah Meiji membuat reformasi adat yang bertujuan agar masyarakat Jepang semakin beradab dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk selama masa Edo. Pemerintah Meiji melakukan modernisasi dengan mencontoh negara Barat agar Jepang bisa setara dengan Barat.

Selain adanya modernisasi, Pemerintah Meiji juga mendapatkan desakan dari negara Barat tentang pembebasan memeluk agama agar bangsa Barat dapat kembali menyebarkan agama Kristen di Jepang, sehingga pemerintah Meiji mencabut larangan penyebaran agama Kristen, selain itu, pemerintah Jepang juga menjadikan kepercayaan Shinto menjadi 'agama nasional' Jepang dan menjadikan agama Buddha sebagai 'agama asing', hal ini menjadi malapetaka bagi penganut agama Buddha.